

ANALISIS KAUSALITAS RUNTUHNYA KERAJAAN SINGASARI AKIBAT DARI GEOPOLITIK GLOBAL SERTA TRANSFORMASI POLITIK MENUJU BERDIRINYA KERAJAAN MAJAPAHIT

Irsyad Arjuna Valentino Mesy Syah Putra Valentine ^{a1}; Andini Ramadhani ^{b2}; Fatimatuz Zahro ^{c3}; Nafisa Desi Wulandari ^{d4} Agus Mursidi ^{e5*}

^a Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia

^b Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia

^c Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia

^d Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia

^e Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia

¹ irsyadasus07@gmail.com; ² andiniramadhani1310@gmail.com; ³ fatimazzahra1809@gmail.com,
⁴ nafisadesiwulandari@gmail.com; ⁵ agumursidi@unibabwi.ac.id

* Corresponding Author; Agus Mursidi



Received 30 April 2026; accepted 30 Mei 2026; published 25 Juni 2026

ABSTRACT

The Singasari Kingdom was a dominant political entity in the 13th-century Indonesian archipelago that suffered a sudden collapse in 1292. This study aims to analyze the causality of Singasari's fall and the process of political transformation leading to the establishment of the Majapahit Kingdom. Utilizing a literature review method and a critical historical approach, this research explores the interaction between internal dynamics in the form of political fragmentation and global intervention by the Mongol Empire. The results show that the collapse of Singasari was caused by a failure in security risk management due to overambitious foreign expansion (strategic overstretch), which triggered a military vacuum in the center of power. This moment of crisis was strategically managed by Raden Wijaya through pragmatic diplomacy and asymmetric military tactics to overthrow Jayakatwang by utilizing Mongol troops. The reconstruction of legitimacy was carried out through the reunification of the Wangsa Rajasa mandala through political marriages and the strengthening of historiographical narratives. This study concludes that Majapahit was not merely a successor to Singasari, but a refined form of the "Cakrawala Mandala Nusantara" vision that integrated inland agrarian strength with the global maritime economy. This geopolitical transformation positioned Majapahit as a thalassocratic empire capable of balancing domestic stability with regional influence on the international stage.

KEYWORDS

Singasari,
Majapahit,
Kertanegara,
Maritime
Geopolitics,
Rajasa Dynasty

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Sejarah kuno Asia Tenggara, khususnya di Pulau Jawa, mencapai titik kulminasi intelektual dan politiknya pada akhir abad ke-13 melalui eksistensi Kerajaan Singasari. Sebagai pewaris dari peradaban panjang sejak era Mataram Kuno hingga Kediri, Singasari di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Kertanegara (1268–1292) mencoba melakukan dekonstruksi terhadap pola kekuasaan tradisional yang bersifat sentris menjadi sebuah visi integratif yang melintasi batas-batas geografis pulau (Muljana, 2006). Kertanegara menggeser paradigma kekuasaan dari sekadar penguasaan teritorial Jawa menuju pembentukan identitas kolektif regional yang lebih luas. Namun, dinamika yang menyertai ambisi tersebut justru menjadi katalisator bagi keruntuhan tragis yang sekaligus membuka jalan bagi lahirnya Majapahit, imperium terbesar yang pernah ada di Nusantara.

Kertanegara merupakan figur yang kontroversial sekaligus visioner dalam historiografi Jawa. Ia bukan sekadar raja yang mementingkan ritualitas keagamaan Tantrayana, melainkan seorang arsitek geopolitik yang memahami pergeseran kekuatan global di daratan Asia. Pada masa itu, Kekaisaran Mongol di bawah Dinasti Yuan sedang berada di puncak ekspansi mereka. Menanggapi tekanan ini, Kertanegara mencetuskan doktrin Cakrawala Mandala Nusantara. Doktrin ini berargumen bahwa persatuan kekuatan militer dan ekonomi di kepulauan Nusantara adalah satu-satunya cara untuk membendung hegemoni Mongol (Kartodirdjo, 1993). Analisis terbaru menunjukkan bahwa diplomasi Kertanegara bukan sekadar provokasi, melainkan upaya pre-emptive strike (serangan pencegahan) melalui aliansi maritim guna memutus jalur logistik Mongol di Asia Tenggara (Nugroho, 2022).

Implementasi dari doktrin tersebut melahirkan Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275, sebuah misi diplomatik sekaligus militer ke wilayah Melayu (Sumatera). Secara strategis, misi ini bertujuan untuk mengamankan Selat Malaka yang merupakan nadi perdagangan dunia saat itu. Namun, pengiriman kekuatan tempur terbaik Singasari ke luar Jawa menciptakan risiko keamanan yang luar biasa besar di dalam negeri. Dalam analisis militer modern, Singasari mengalami apa yang disebut sebagai *strategic overstretch* atau pengembangan kekuatan yang melampaui kemampuan pertahanan di basis utama (Pratama, 2020). Pelemahan pertahanan di jantung kerajaan ini mengakibatkan kerentanan fatal terhadap ancaman dari faksi-faksi domestik yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Ketidakeimbangan antara ambisi luar negeri dan stabilitas domestik ini menciptakan celah yang dieksploitasi oleh aktor-aktor politik internal. Jayakatwang, sebagai keturunan dari raja-raja Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, menyimpan dendam historis yang mendalam. Ia melihat pengiriman pasukan ke Sumatera bukan sebagai langkah perlindungan Nusantara, melainkan kesempatan untuk memulihkan kejayaan Kediri (Achmad, 2021). Hasutan dari Arya Wiraraja, seorang birokrat cerdik yang dimutasi ke Madura, semakin memperuncing situasi tersebut melalui permainan intelijen dan manipulasi informasi. Kematian Kertanegara pada tahun 1292 saat upacara keagamaan menandai berakhirnya supremasi Singasari. Namun, puing-puing kekuasaan ini segera ditransformasi oleh Raden Wijaya melalui strategi diplomasi dan militer yang adaptif—termasuk pemanfaatan tentara Mongol—hingga akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit (Santoso, 2023).

Beberapa kajian terdahulu telah membahas keruntuhan Kerajaan Singasari dan bangkitnya Majapahit secara terpisah. Achmad (2021) menyoroti pemberontakan Jayakatwang sebagai pemicu utama kejatuhan Singasari, sementara Nugroho (2022) lebih memfokuskan pada aspek relasi diplomatik dan militer antara Jawa dan Mongol. Kajian Santoso (2023) mendalami konflik internal Dinasti Rajasa dari perspektif sosio politik. Akan tetapi, studi-studi ini belum secara komprehensif menghubungkan faktor geopolitik global, fragmentasi politik internal, dan strategi perubahan kekuasaan Raden Wijaya dalam bingkai yang saling terjalin. Dengan demikian, riset ini berupaya menanggulangi defisiensi tersebut dengan membedah korelasi sebab akibat antara kejatuhan Singasari dan kemunculan Majapahit melalui pendekatan historis kritis serta sudut pandang geopolitik.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah (*historical research*) yang sistematis. Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama: heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1946). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan analisis kausalitas didasarkan pada fakta objektif yang telah teruji validitasnya melalui perbandingan berbagai dokumen zaman kuno.

Tahap Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan data dari dua jenis sumber utama. Sumber pertama adalah data primer berupa teks sastra sejarah kontemporer, yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Nagarakretagama. Pararaton memberikan narasi dramatis mengenai pemberontakan Jayakatwang, sementara Nagarakretagama memberikan sudut pandang formal mengenai legitimasi wangsa (Muljana, 2006). Selain itu, digunakan pula kronik Dinasti Yuan (*Yuan-shi*) untuk memvalidasi kehadiran tentara Mongol (Groeneveldt, 2009). Sumber kedua adalah data sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan.

Tahap verifikasi dijalankan dengan menyalangkan berbagai sumber data, membandingkan informasi dari Pararaton, Nagarakretagama, dan catatan *Yuan-shi*. Jika ada perbedaan data, peneliti akan melakukan tinjauan eksternal dan internal pada setiap sumber. Tinjauan eksternal berguna untuk mengukur latar belakang, masa penulisan, dan kredibilitas sumber, sementara tinjauan internal untuk

mengukur kesesuaian konten dan kecenderungan pribadi penulis. Sebagai contoh, Pararaton cenderung menampilkan cerita yang lebih dramatis tentang pemberontakan Jayakatwang, sementara Nagarakretagama lebih berfungsi sebagai penunjang kekuasaan politik Majapahit. Maka, data yang muncul dari kedua sumber tersebut diperiksa ulang dengan catatan Yuan-shi demi mendapatkan gambaran sejarah yang lebih netral. Fakta sejarah dinilai sangat terpercaya jika didukung oleh lebih dari satu sumber yang berbeda.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap teks primer Pararaton, Nagarakretagama, dan kronik Dinasti Yuan (Yuan-shi), ditemukan tiga temuan utama terkait transisi kekuasaan dari Singasari ke Majapahit:

Identifikasi Penyebab Kausalitas Keruntuhan Singasari

Identifikasi penyebab kausalitas keruntuhan Kerajaan Singasari pada tahun 1292 mengungkap adanya interaksi kompleks antara kebijakan luar negeri yang agresif dan kerentanan stabilitas domestik. Studi literatur terhadap publikasi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan *Cakrawala Mandala Nusantara* yang diinisiasi oleh Kertanegara merupakan pemicu utama terjadinya pergeseran kekuatan di Jawa. Menurut Mualifah (2018), pengiriman pasukan besar-besaran dalam Ekspedisi Pamalayu tidak hanya bertujuan untuk perluasan wilayah, tetapi merupakan strategi defensif-aktif untuk membendung pengaruh Dinasti Yuan. Namun, efektivitas strategi ini dibayar mahal dengan pengabaian aspek keamanan di pusat pemerintahan Tumapel, yang menciptakan peluang bagi faksi-faksi oposisi internal untuk melakukan konsolidasi kekuatan secara klandestin.

Faktor kausalitas internal yang paling menonjol adalah fragmentasi elite politik yang berakar pada dendam sejarah antara Wangsa Rajasa dan keturunan penguasa Kediri. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2021) menekankan bahwa posisi Jayakatwang sebagai bupati Gelang-gelang merupakan ancaman laten yang gagal diantisipasi oleh intelijen Singasari. Jayakatwang memanfaatkan ketidakpuasan birokrasi dan dukungan dari tokoh kunci seperti Arya Wiraraja untuk merancang kudeta. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa struktur politik patrimonial Singasari saat itu sedang mengalami fase pelemahan legitimasi di tingkat lokal, yang diperparah oleh beban pajak dan mobilisasi sumber daya untuk kepentingan ekspedisi luar negeri.

Secara taktis, hasil studi literatur mengidentifikasi bahwa keberhasilan serangan Jayakatwang sangat bergantung pada taktik *diversionary* (pengalihan). Sebagaimana diuraikan dalam analisis teks sejarah oleh Pratama (2020), pasukan Jayakatwang dibagi menjadi dua front untuk memecah konsentrasi pertahanan Singasari yang sudah tipis. Pasukan utara bertindak sebagai umpan untuk menarik keluar sisa-sisa pasukan elite yang dipimpin oleh Raden Wijaya dari ibu kota. Sementara itu, pasukan inti bergerak dari selatan untuk menyerang istana saat Kertanegara sedang melaksanakan ritual keagamaan. Hal ini mengonfirmasi bahwa keruntuhan Singasari disebabkan oleh kegagalan total dalam sistem komando dan pengendalian (C2) di pusat kerajaan.

Pararaton mencatat bahwa serangan Jayakatwang dilakukan melalui dua arah, yaitu serangan pengalih dari utara dan serangan utama dari selatan yang berhasil mencapai pusat kekuasaan Singasari ketika Kertanegara sedang melaksanakan upacara keagamaan (Muljana, 2006). Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberontakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kelemahan sistem pertahanan dan pengamanan internal kerajaan.

Dari perspektif geopolitik global, intervensi Kekaisaran Mongol menjadi faktor eksternal yang mempercepat proses transisi kekuasaan ini. Studi terbaru yang merujuk pada kronik *Yuan-shi* menyatakan bahwa provokasi Kertanegara terhadap utusan Mongol merupakan kesalahan strategis yang fatal dalam diplomasi internasional (Groeneveldt dalam interpretasi baru oleh Nugroho, 2022). Ketegangan ini menciptakan tekanan psikologis dan politik terhadap Singasari, di mana Jayakatwang melihat kedatangan armada Mongol yang akan datang sebagai momentum tepat untuk meruntuhkan kekuasaan Kertanegara sebelum bantuan dari pasukan ekspedisi di Sumatera sempat kembali ke Jawa.

Kausalitas keruntuhan ini juga dipengaruhi oleh aspek sosio-religius, di mana orientasi Kertanegara terhadap ajaran Tantrayana dianggap oleh sebagian elite tradisional sebagai penyimpangan yang melemahkan tatanan moral kerajaan. Berdasarkan kajian filosofis-historis oleh Santoso (2023), fokus berlebihan raja pada ritual-ritual spiritual untuk mencapai tingkatan *Jina* menyebabkan ia kehilangan sentuhan pada realitas sosial-politik di akar rumput. Ketidakpuasan ini memberikan ruang bagi Jayakatwang untuk memposisikan dirinya sebagai pemulih tatanan nilai tradisional Jawa yang lebih

stabil, yang kemudian mendapatkan simpati dari faksi militer yang merasa ditinggalkan oleh ambisi luar negeri raja.

Selanjutnya, hasil studi literatur menemukan bahwa keruntuhan Singasari memiliki pola kausalitas linier terhadap strategi awal pembentukan Majapahit. Raden Wijaya, sebagai penyintas utama dari tragedi ini, melakukan evaluasi mendalam terhadap kelemahan sistem pertahanan mertuanya. Menurut penelitian Rohmansyah (2022), pembangunan basis kekuatan di Hutan Tarik (Majapahit) dirancang dengan mengutamakan aspek keamanan geografis dan kemudahan akses logistik. Hal ini menunjukkan bahwa kehancuran Singasari memberikan pelajaran empiris bagi Raden Wijaya untuk tidak mengulangi kesalahan *strategic overstretch* di masa awal pemerintahan Majapahit.

Hasil penelitian juga menunjukkan peran krusial intelijen dan kontra-intelijen dalam transisi kekuasaan ini. Arya Wiraraja diidentifikasi sebagai aktor *double-agent* yang sangat efektif dalam memanipulasi informasi baik kepada pihak Singasari, Kediri, maupun nantinya kepada pihak Mongol (Mualifah, 2018). Keberhasilan Wiraraja dalam mengarahkan Jayakatwang untuk menyerang di saat yang tepat membuktikan bahwa keruntuhan Singasari bukan sekadar kekalahan militer, melainkan kekalahan dalam perang informasi dan strategi intelijen tingkat tinggi yang melibatkan jaringan antar-pulau.

Sebagai kesimpulan dari hasil studi literatur, dapat dinyatakan bahwa keruntuhan Singasari merupakan akibat dari ketidakmampuan sistem negara dalam menyeimbangkan antara ambisi menjadi kekuatan regional (*regional power*) dengan pemeliharaan keamanan domestik. Sinergi antara agresi Mongol dari luar dan pengkhianatan Jayakatwang dari dalam menciptakan "badai sempurna" yang meruntuhkan struktur kekuasaan Kertanegara dalam waktu singkat. Temuan ini mempertegas teori bahwa kejatuhan sebuah imperium besar sering kali bermula dari dalam istana sendiri, di mana ancaman internal sering kali lebih mematikan daripada invasi asing yang paling ditakuti sekalipun (Santoso, 2023).

Strategi Transformasi Politik Raden Wijaya

Hasil ekstraksi data mengenai peran Raden Wijaya menunjukkan adanya penggunaan taktik militer asimetris dan diplomasi pragmatis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Wijaya tidak langsung melakukan konfrontasi terbuka terhadap Jayakatwang pasca-runtuhnya Singasari. Sebaliknya, ia melakukan manuver berupa:

1. Penyelamatan diri ke Madura untuk membangun basis aliansi dengan Arya Wiraraja.
2. Pembangunan pusat logistik dan militer di Hutan Tarik (Majapahit) melalui skema diplomasi semu dengan Jayakatwang.
3. Pemanfaatan tentara Mongol sebagai instrumen militer untuk menghancurkan kekuatan Kediri, yang kemudian diikuti dengan serangan kejutan terhadap tentara Mongol itu sendiri guna memulihkan kedaulatan Jawa sepenuhnya.

Strategi transformasi politik yang diterapkan oleh Raden Wijaya pasca-runtuhnya Singasari mencerminkan sebuah kepemimpinan krisis yang adaptif dan sangat strategis. Menurut penelitian Mualifah (2018), Raden Wijaya tidak melakukan perlawanan sporadis yang emosional setelah gugurnya Kertanegara, melainkan memilih jalur pengungsian strategis ke Madura untuk bertemu Arya Wiraraja. Langkah ini diidentifikasi sebagai tahap "konsolidasi awal", di mana Wijaya menyadari bahwa pemulihan Wangsa Rajasa memerlukan dukungan logistik dan legitimasi politik dari tokoh-tokoh kunci di luar pusat kekuasaan Jayakatwang.

Transformasi politik Raden Wijaya ditandai dengan peralihan dari taktik militer konvensional menuju diplomasi pragmatis yang bersifat semu (*pseudo-alignment*). Achmad (2021) menjelaskan bahwa atas saran Arya Wiraraja, Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang guna mendapatkan kepercayaan politik. Keberhasilan strategi ini dibuktikan dengan pemberian izin bagi Wijaya untuk membuka pemukiman di Hutan Tarik. Hal ini merupakan manuver cerdas yang memungkinkan Wijaya membangun basis militer dan intelijen secara klandestin di bawah pengawasan musuh, sebuah langkah yang sering disebut dalam studi strategi modern sebagai pembangunan basis kekuatan di wilayah marginal.

Dalam aspek pembangunan infrastruktur politik, Raden Wijaya menerapkan prinsip "pembangunan kota berbasis pertahanan" di wilayah Majapahit. Menurut analisis spasial oleh Rohmansyah (2022), pemilihan Hutan Tarik sebagai pusat kekuatan baru bukan sekadar kebutuhan lahan, melainkan pertimbangan geostrategis karena lokasinya yang dekat dengan aliran Sungai Brantas sebagai nadi transportasi dan logistik. Strategi transformasi ini memungkinkan Majapahit berkembang

menjadi pusat ekonomi baru yang mampu menarik sisa-sisa pasukan Singasari yang masih setia (eks-pasukan Pamalayu) untuk bergabung kembali di bawah panah Wangsa Rajasa.

Variabel paling krusial dalam transformasi politik Raden Wijaya adalah kemampuannya melakukan eksploitasi terhadap intervensi asing tanpa kehilangan kedaulatan. Nugroho (2022) dalam kajiannya mengenai konflik Jawa-Mongol menegaskan bahwa Wijaya menggunakan teknik diplomasi *double-cross* terhadap tentara Mongol. Ia memanfaatkan daya hancur armada Mongol untuk menghancurkan musuh domestiknya, Jayakatwang, sementara di saat yang sama ia menyiapkan pasukan gerilya untuk menyerang balik sekutu asingnya tersebut sesaat setelah tujuan domestiknya tercapai.

Strategi transformasi ini juga melibatkan rekonstruksi narasi legitimasi yang kuat melalui pernikahan politik. Nagarakretagama Pupuh 47 menjelaskan bahwa Raden Wijaya memperoleh legitimasi politik melalui hubungan langsung dengan keluarga Kertanegara dan diposisikan sebagai penerus sah Wangsa Rajasa (Muljana, 2006). Informasi dari sumber primer ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan Majapahit tidak dipahami sebagai pendirian kerajaan baru yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai kelanjutan politik dari Singasari. Sebagaimana dijabarkan oleh Santoso (2023), pernikahan Raden Wijaya dengan keempat putri Kertanegara (Tri Bhuaneswari, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri) merupakan puncak dari transformasi politiknya dari seorang panglima pelarian menjadi penguasa sah. Tindakan ini secara efektif "mengunci" seluruh saluran legitimasi Singasari ke dalam entitas Majapahit, sehingga tidak ada faksi lain (seperti sisa-sisa pengikut Jayakatwang) yang memiliki alasan kuat untuk menggugat takhtanya berdasarkan hukum darah.

Beralih ke dimensi birokrasi, Raden Wijaya melakukan transformasi dari kepemimpinan absolut menuju sistem distribusi kekuasaan yang berbasis meritokrasi terhadap para pendukung setianya. Pratama (2020) mencatat bahwa pengangkatan tokoh-tokoh seperti Nambi, Sora, dan Ranggalawe sebagai pejabat tinggi merupakan strategi untuk menjaga stabilitas internal di masa transisi. Namun, strategi ini juga menjadi tantangan di kemudian hari, karena distribusi kekuasaan tersebut memicu dinamika politik internal yang kompleks antara faksi "setia" dan faksi "kepentingan," yang menjadi karakteristik unik dalam awal pemerintahan Majapahit.

Hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa Raden Wijaya berhasil melakukan transformasi identitas nasional dari sebuah kerajaan agraris pedalaman menuju embrional kerajaan maritim. Berdasarkan penelitian Hall dalam interpretasi baru oleh Nugroho (2022), kebijakan awal Majapahit pasca-pengusiran Mongol sangat menekankan pada kontrol pelabuhan-pelabuhan utama di Pantai Utara Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Wijaya memahami betul bahwa kekuatan politik Majapahit hanya bisa bertahan lama jika ditopang oleh kekuatan ekonomi yang bersumber dari perdagangan internasional dan penguasaan laut.

Sebagai sintesis akhir, strategi transformasi politik Raden Wijaya diakui sebagai sebuah mahakarya diplomasi dan militer yang mampu mengubah kehancuran total menjadi imperium besar. Analisis sosio-politik oleh Santoso (2023) menyimpulkan bahwa Wijaya berhasil menerapkan kepemimpinan transformasional yang tidak hanya memulihkan kedaulatan, tetapi juga memperluas visi *Cakrawala Mandala Nusantara* menjadi kenyataan administratif. Transformasi ini menjadi batu pijakan utama bagi kejayaan Majapahit di masa-masa berikutnya, membuktikan bahwa keberhasilan politik jangka panjang sangat bergantung pada kelenturan strategi dan ketepatan momentum pengambilan keputusan.

Rekonstruksi Legitimasi Wangsa Baru

Penelitian ini menemukan bahwa berdirinya Majapahit pada tahun 1293 didasarkan pada upaya penyatuan kembali (*re-unification*) mandala Singasari yang sempat terpecah. Hasil analisis terhadap Nagarakretagama menunjukkan bahwa Raden Wijaya memperkuat takhtanya melalui ikatan pernikahan dengan empat putri Kertanegara (Tri Bhuaneswari, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri). Tindakan ini secara hukum adat dan tradisi politik Jawa Kuno merupakan langkah krusial untuk mentransfer seluruh "wahyu" atau legitimasi kekuasaan Wangsa Rajasa dari Singasari ke dalam entitas baru, yaitu Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa Majapahit secara legal-formal dipandang sebagai kelanjutan langsung dari kedaulatan Singasari.

Rekonstruksi legitimasi yang dilakukan oleh Raden Wijaya merupakan sebuah proses rekayasa politik pasca-krisis yang bertujuan untuk memulihkan wibawa Wangsa Rajasa dalam wujud Kerajaan Majapahit. Berdasarkan hasil studi literatur, legitimasi ini tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, melainkan melalui penggabungan antara hak darah (*bloodright*) dan pengakuan sosio-religius. Menurut Santoso (2023), Raden Wijaya memahami bahwa stabilitas politik di Jawa pasca-runtuhnya Singasari

sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memposisikan dirinya sebagai pelindung dharma. Oleh karena itu, langkah pertama Majapahit adalah menghapus noda kekalahan Singasari dengan merekonstruksi identitas baru yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur leluhur Wangsa Rajasa.

Salah satu pilar utama dalam rekonstruksi ini adalah penggunaan mekanisme pernikahan politik yang bersifat integratif dan sakral. Analisis dari Achmad (2021) menunjukkan bahwa pernikahan Raden Wijaya dengan keempat putri Kertanegara—Tri Bhuaneswari, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri—adalah strategi untuk "menyedot" seluruh sisa legitimasi Singasari ke dalam dirinya. Melalui pernikahan ini, Wijaya memastikan bahwa tidak ada faksi lain yang dapat mengklaim hak atas takhta berdasarkan garis keturunan perempuan Kertanegara. Secara simbolis, langkah ini menyatukan kembali mandala yang pecah dan mengukuhkan Majapahit sebagai pewaris tunggal kedaulatan Wangsa Rajasa di Jawa.

Selain aspek trah keturunan, Raden Wijaya melakukan rekonstruksi legitimasi melalui narasi kepahlawanan atas pengusiran kekuatan asing. Keberhasilan Wijaya dalam mengusir tentara Mongol pada tahun 1293 memberikan modal politik berupa citra sebagai penyelamat kedaulatan Nusantara. Penelitian Nugroho (2022) menekankan bahwa kemenangan atas kekuatan global (Dinasti Yuan) merupakan elemen legitimasi karismatik yang sangat kuat. Hal ini memberikan kewibawaan luar biasa bagi Majapahit di mata penguasa-penguasa daerah, sehingga banyak entitas politik di luar Jawa yang sebelumnya menyatakan merdeka pasca-Singasari, secara sukarela kembali memberikan penghormatan kepada Majapahit.

Penguatan legitimasi juga dilakukan melalui sinkretisme agama dan pembangunan struktur keagamaan yang bersifat pendharmaan. Berdasarkan kajian Santoso (2023), Raden Wijaya melanjutkan tradisi *Sima-Buddha* namun dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap institusi-institusi keagamaan tradisional. Dengan memposisikan diri sebagai "Raja Pendeta" yang menghormati warisan mertuanya, ia berhasil memenangkan hati kasta Brahmana dan para pendeta. Dukungan religius ini sangat vital karena dalam struktur masyarakat Jawa Kuno, pengakuan dari otoritas spiritual merupakan bentuk legalitas tertinggi yang dapat mencegah terjadinya pemberontakan berdasarkan ketidakpuasan moral.

Historiografi dan sastra keraton juga dimanfaatkan secara intensif sebagai instrumen legitimasi ideologis. Mualifah (2018) mencatat bahwa narasi-narasi sejarah yang dikembangkan pada masa awal Majapahit, yang nantinya tertuang dalam *Nagarakretagama*, sengaja disusun untuk menciptakan kesinambungan sejarah yang tanpa celah (*seamless continuity*). Raden Wijaya diposisikan sebagai "Bhatara Sakti" yang lahir dari penderitaan krisis untuk membawa zaman keemasan baru. Penggunaan teks-teks ini berfungsi sebagai sarana propaganda untuk menanamkan loyalitas mendalam pada rakyat bahwa Majapahit adalah kehendak kosmis yang harus didukung demi keharmonisan jagat.

Distribusi kekuasaan kepada para pengikut setia melalui pemberian tanah perdikan (*Sima*) juga menjadi temuan krusial dalam mekanisme legitimasi ini. Menurut Pratama (2020), pemberian hak istimewa kepada tokoh-tokoh seperti Nambi dan Sora bukan sekadar balas jasa militer, melainkan upaya menciptakan jaringan patronase yang kuat di sekitar takhta. Legitimasi ini bersifat timbal-balik, di mana para elit daerah mengakui kedaulatan Wijaya sebagai imbalan atas otonomi ekonomi dan status sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas Majapahit di masa awal yang penuh gejolak transisi kekuasaan.

Transformasi gelar kebesaran menjadi simbol penyatuan dua era yang berbeda juga diidentifikasi sebagai langkah rekonstruksi yang cerdas. Nama penobatan *Kertarajasa Jayawardhana* menggabungkan penghormatan kepada Kertanegara dan kejayaan Wangsa Rajasa. Nugroho (2022) berargumen bahwa gelar ini berfungsi sebagai jembatan identitas yang merangkul masa lalu sekaligus memproyeksikan masa depan. Hal ini memberikan rasa aman psikologis bagi sisa-sisa birokrasi Singasari bahwa tatanan nilai mereka tidak hilang, melainkan sedang dikembangkan menjadi entitas yang lebih besar di bawah bendera Majapahit.

Secara keseluruhan, rekonstruksi legitimasi Wangsa Baru oleh Raden Wijaya adalah sebuah mahakarya diplomasi kebudayaan dan politik. Sebagaimana disimpulkan oleh Rohmansyah (2022), keberhasilan proses ini memungkinkan Majapahit bertransformasi dari sebuah kerajaan pelarian di Hutan Tarik menjadi imperium pemersatu Nusantara. Tanpa upaya rekonstruksi legitimasi yang sistematis ini, Majapahit kemungkinan besar hanya akan berakhir sebagai kerajaan transisi yang rapuh. Wijaya berhasil membuktikan bahwa sebuah wangsa baru tidak hanya butuh pedang untuk berdiri, tetapi juga butuh akar sejarah dan kepercayaan publik yang kuat untuk bertahan selama berabad-abad.

Pembahasan

Dinamika Internal Fragmentasi Politik dan Kehancuran Singasari

Kehancuran Singasari pada 1292 tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan akibat akumulasi ketegangan politik yang gagal dimitigasi. Menurut Slamet Muljana (2005: 121), kebijakan Kertanegara yang terlalu fokus pada integrasi Nusantara menyebabkan ia mengabaikan stabilitas di jantung kekuasaan. Hal ini selaras dengan temuan Sartono Kartodirdjo (1993) bahwa struktur politik Jawa Kuno yang bersifat patrimonial sangat bergantung pada kewibawaan pribadi raja; ketika raja dianggap mengabaikan keamanan domestik, faksi-faksi internal mulai melakukan infiltrasi.

Data primer dalam Pararaton menyebutkan bahwa Jayakatwang memanfaatkan "kekosongan pertahanan" (sunya) saat pasukan elite dikirim ke Melayu (Achmad, 2021: 82). Jayakatwang menggunakan strategi "Umpan Utara-Serang Selatan". Ia mengirim pasukan kecil ke utara untuk mengecoh Raden Wijaya, sementara pasukan utama menyerbu istana dari selatan saat Kertanegara sedang melakukan ritual keagamaan (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 415).

Fragmentasi politik internal di Kerajaan Singasari merupakan variabel determinan yang memicu runtuhnya kedaulatan Wangsa Rajasa pada tahun 1292. Berdasarkan hasil studi literatur, stabilitas politik Singasari di bawah Kertanegara mengalami keretakan akibat ketidakmampuan sistem pemerintahan dalam memitigasi konflik kepentingan antar-elite. Menurut Achmad (2021), kebijakan Kertanegara yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat senior, termasuk pengasingan Arya Wiraraja ke Madura, menciptakan faksi oposisi yang solid di luar lingkaran istana. Fragmentasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap loyalitas tradisional yang menjadi pondasi kekuatan kerajaan-kerajaan Jawa kuno.

Kausalitas keruntuhan ini semakin diperparah oleh fenomena *strategic overstretch* akibat ambisi luar negeri yang tidak diimbangi dengan manajemen risiko domestik. Penelitian Pratama (2020) menunjukkan bahwa konsentrasi kekuatan militer pada Ekspedisi Pamalayu menyebabkan terjadinya "anemia pertahanan" di ibu kota Tumapel. Dalam perspektif teori keamanan, Singasari berada dalam kondisi rentan karena pusat gravitasi kekuasaan kehilangan perlindungan fisik utamanya. Fragmentasi politik internal ini bertemu dengan kerentanan militer, yang kemudian dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk melancarkan serangan kejutan dari arah yang tidak terduga.

Secara spesifik, dendam historis keturunan Kediri menjadi motor penggerak fragmentasi yang sangat destruktif. Mualifah (2018) berargumen bahwa Jayakatwang berhasil mengeksploitasi sentimen negatif di kalangan birokrasi Singasari yang merasa tidak puas dengan gaya kepemimpinan Kertanegara yang otokratis. Jayakatwang bukan hanya bertindak sebagai pemberontak, tetapi juga sebagai figur pemersatu bagi faksi-faksi yang merasa terpinggirkan oleh visi *Cakrawala Mandala Nusantara*. Hal ini menunjukkan bahwa kehancuran Singasari didorong oleh kegagalan integrasi horizontal di tingkat elite penguasa lokal.

Dimensi sosio-religius juga memainkan peran penting dalam memperlebar jurang fragmentasi internal. Kajian Santoso (2023) mengungkapkan bahwa orientasi keagamaan Kertanegara terhadap Tantrayana tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan elite agama. Sebagian kelompok menganggap aktivitas ritual tersebut menguras energi negara di tengah ancaman geopolitik Mongol yang kian nyata. Ketidaksesuaian persepsi mengenai prioritas negara ini melemahkan *social cohesion* (kohesi sosial), sehingga ketika Jayakatwang melakukan agresi, tidak ada perlawanan kolektif yang cukup kuat dari rakyat untuk melindungi istana.

Peran intelijen dan pengkhianatan birokrasi menjadi faktor teknis yang mengunci kehancuran Singasari. Berdasarkan hasil studi literatur, Arya Wiraraja bertindak sebagai arsitek di balik layar yang menghubungkan kepentingan Jayakatwang dengan informasi kelemahan pertahanan istana. Achmad (2021) mencatat bahwa komunikasi rahasia antara Madura dan Gelang-gelang (Kediri) membuktikan bahwa fragmentasi politik telah menembus batas-batas birokrasi formal. Strategi "Umpan Utara-Serang Selatan" yang dilakukan Jayakatwang hanya mungkin berhasil jika terdapat data akurat mengenai jadwal ritual dan posisi pasukan Raden Wijaya, yang mana data tersebut bersumber dari internal istana sendiri.

Selain itu, beban ekonomi akibat mobilisasi sumber daya untuk ekspedisi luar pulau menciptakan tekanan fiskal yang memicu ketidakpuasan di tingkat desa (*wanua*). Menurut analisis sosio-politik Nugroho (2022), stabilitas kerajaan Jawa sangat bergantung pada keseimbangan antara tuntutan pusat dan kesejahteraan daerah. Ketika Kertanegara memaksa pengumpulan upeti dan tenaga kerja untuk memperkuat armada lautnya, ia secara tidak langsung melemahkan dukungan rakyat jelata. Jayakatwang

memanfaatkan ketidakpuasan ini dengan menjanjikan restorasi tatanan lama Kediri yang dianggap lebih stabil secara agraris.

Kausalitas keruntuhan ini juga dapat dilihat dari kegagalan Kertanegara dalam membangun sistem suksesi yang solid. Rohmansyah (2022) menekankan bahwa absennya putra mahkota laki-laki yang kuat di pusat pemerintahan membuat faksi-faksi di Singasari tidak memiliki simbol pemersatu saat krisis militer terjadi. Raden Wijaya, meskipun memiliki kapabilitas militer, saat itu masih dipandang sebagai pihak luar (menantu) yang otoritasnya terbatas. Ketidadaan *single point of authority* yang siap sedia di istana saat serangan terjadi mempercepat proses disintegrasi birokrasi pasca-kematian raja.

Sebagai sintesis, kehancuran Singasari adalah manifestasi dari krisis multidimensi yang berakar pada fragmentasi politik internal. Sinergi antara kebijakan luar negeri yang terlalu ambisius dan pengabaian terhadap dinamika politik domestik menciptakan ruang bagi keruntuhan yang total. Sebagaimana disimpulkan oleh Santoso (2023), pelajaran utama dari jatuhnya Singasari adalah bahwa kekuatan sebuah imperium di panggung internasional tidak akan bertahan lama jika fondasi politik di pusat kekuasaan mengalami pembusukan dari dalam akibat konflik kepentingan elite dan lemahnya loyalitas birokrasi.

Intervensi Global Peran Mongol sebagai Katalisator Perubahan

Kedatangan armada Mongol (Tartar) pada 1293 di bawah pimpinan Shih-pi, Ike Mese, dan Kau Hsing membawa dimensi baru dalam konflik Jawa. Catatan Yuan-shi menyebutkan bahwa armada Yuan yang dipimpin oleh Shih-pi, Ike Mese, dan Kau Hsing tiba di Jawa sebagai bagian dari ekspedisi hukuman yang diperintahkan oleh Kubilai Khan setelah penghinaan terhadap utusan Mongol di Singasari (Groeneveldt, 2009). Keterangan ini menunjukkan bahwa kedatangan pasukan Mongol bukan semata-mata bagian dari konflik lokal Jawa, melainkan bagian dari kebijakan ekspansi global Dinasti Yuan pada akhir abad ke-13. Berdasarkan catatan W.P. Groeneveldt (2009: 32) dalam kronik Dinasti Yuan, tentara Mongol datang untuk menghukum Kertanegara. Namun, Raden Wijaya berhasil meyakinkan Mongol bahwa Jayakatwang-lah yang harus bertanggung jawab sebagai penguasa baru Jawa.

Analisis dari M.C. Ricklefs (2008: 55) menunjukkan bahwa Raden Wijaya menerapkan strategi hedging atau lindung nilai politik. Ia memanfaatkan daya hancur teknologi militer Mongol untuk meruntuhkan benteng Kediri. Setelah Jayakatwang tumbang, Wijaya melakukan manuver pengusiran paksa terhadap Mongol melalui serangan mendadak saat pasukan Tartar sedang lengah merayakan kemenangan (Slametmuljana, 1979).

Intervensi global oleh Kekaisaran Mongol di bawah Dinasti Yuan merupakan faktor eksternal paling signifikan yang mengubah peta geopolitik Jawa pada akhir abad ke-13. Kehadiran armada Mongol di perairan Jawa bukan sekadar misi hukuman diplomatik, melainkan representasi dari ekspansi hegemoni transnasional yang memaksa kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk mendefinisikan ulang posisi politik mereka. Menurut Nugroho (2022), tuntutan Kublai Khan agar Singasari mengakui supremasi Mongol memicu respons defensif-aktif dari Kertanegara. Namun, kegagalan diplomasi ini justru menjadi katalisator yang mempercepat keruntuhan tatanan lama di Jawa, menciptakan kevakuman kekuasaan yang kemudian diisi oleh strategi pragmatis Raden Wijaya.

Peran Mongol sebagai katalisator perubahan terlihat jelas dalam cara Raden Wijaya memanfaatkan kehadiran militer asing untuk menyelesaikan konflik domestik yang buntu. Berdasarkan studi literatur terbaru, kedatangan tentara Mongol terjadi pada momen yang tepat ketika Raden Wijaya tidak memiliki cukup kekuatan untuk menumbangkan Jayakatwang secara mandiri. Achmad (2021) menjelaskan bahwa Wijaya menerapkan taktik "meminjam tangan musuh" dengan meyakinkan para panglima Mongol bahwa Jayakatwang adalah pewaris Kertanegara yang harus bertanggung jawab atas penghinaan diplomatik masa lalu. Intervensi ini secara efektif mengubah dinamika peperangan dari pemberontakan lokal menjadi konflik berskala internasional yang melibatkan teknologi militer tercanggih pada masanya.

Secara teknis, intervensi Mongol memperkenalkan inovasi dalam seni peperangan di Jawa yang menjadi modal awal kekuatan Majapahit. Penelitian Nugroho (2022) yang menganalisis kronik *Yuan-shi* menunjukkan bahwa armada Mongol membawa persenjataan bubuk mesiu dan taktik pengepungan benteng yang sebelumnya jarang digunakan secara masif di Nusantara. Pengalaman militer bersama pasukan Mongol ini memberikan pengetahuan taktis bagi prajurit Raden Wijaya. Penggunaan elemen-elemen teknologi militer asing ini menjadi salah satu pilar transformasi Majapahit dari kekuatan agraris

menjadi entitas politik yang memiliki kapabilitas militer yang lebih modern dan adaptif terhadap ancaman luar.

Selain dimensi militer, peran Mongol sebagai katalisator perubahan juga menyentuh aspek ekonomi dan perdagangan laut. Kehadiran armada besar Mongol di pesisir utara Jawa secara tidak langsung mempertegas pentingnya penguasaan jalur maritim bagi kedaulatan sebuah kerajaan. Menurut Muallifah (2018), interaksi dengan Mongol menyadarkan para elit Jawa tentang posisi strategis Nusantara dalam jalur sutra maritim. Hal ini mendorong Raden Wijaya pasca-pendirian Majapahit untuk lebih berorientasi pada kontrol pelabuhan utama, sebuah pergeseran visi dari Singasari yang sebelumnya cenderung lebih terfokus pada ekspansi teritorial daratan melalui Ekspedisi Pamalayu.

Dinamika hubungan Jawa-Mongol juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola diplomasi internasional di Nusantara. Santoso (2023) berargumen bahwa keberhasilan Raden Wijaya melakukan serangan balik terhadap tentara Mongol setelah kehancuran Kediri merupakan pernyataan kedaulatan yang luar biasa. Peristiwa ini mengirimkan pesan ke seluruh kawasan Asia Tenggara bahwa Jawa bukan lagi wilayah satelit yang mudah ditaklukkan. Transformasi ini mengubah citra Majapahit di mata internasional dari sebuah kerajaan baru yang rapuh menjadi kekuatan regional yang disegani karena mampu mengalahkan salah satu armada militer terkuat di dunia pada masa itu.

Fragmentasi tentara Mongol pasca-serangan kejutan oleh Raden Wijaya juga meninggalkan sisa-sisa sumber daya manusia yang berpengaruh pada struktur sosial-budaya awal Majapahit. Beberapa studi literatur, termasuk kajian Pratama (2020), menyebutkan adanya tentara atau pengrajin Mongol yang tertinggal atau membelot ke pihak Majapahit. Integrasi terbatas ini membawa pengaruh pada teknik pembuatan keramik, persenjataan, hingga aspek logistik militer. Katalisator perubahan di sini bermakna bahwa Majapahit mampu menyerap elemen-elemen unggul dari peradaban Mongol tanpa harus kehilangan identitas budayanya sendiri.

Secara politis, intervensi Mongol memaksa Raden Wijaya untuk melakukan restrukturisasi birokrasi yang lebih responsif terhadap ancaman global. Rohmansyah (2022) menekankan bahwa pengalaman menghadapi Mongol membuat Majapahit membangun sistem intelijen dan pengawasan pesisir yang lebih ketat. Perubahan ini krusial untuk mencegah terulangnya infiltrasi asing di masa depan. Majapahit belajar bahwa kekuatan diplomasi harus didukung oleh kesiapsiagaan militer di garis depan maritim, sebuah pelajaran berharga yang didapat langsung dari interaksi traumatis sekaligus strategis dengan pasukan Dinasti Yuan.

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, intervensi Mongol tidak dapat dipandang hanya sebagai invasi yang merusak, melainkan sebagai "badai kreatif" yang meruntuhkan struktur politik Singasari yang kaku dan membuka jalan bagi fleksibilitas politik Majapahit. Santoso (2023) menyimpulkan bahwa tanpa tekanan global dari Mongol, transisi kekuasaan di Jawa mungkin akan berlangsung jauh lebih lambat atau bahkan terjebak dalam perang saudara yang berkepanjangan antara pendukung Singasari dan Kediri. Mongol secara tidak sengaja telah menyediakan instrumen, momentum, dan urgensi bagi Raden Wijaya untuk membangun fondasi Majapahit sebagai imperium maritim yang tangguh di panggung dunia.

Rekonstruksi Legitimasi Penyatuan Mandala Wangsa Rajasa

Pasca terusirnya Mongol, tantangan terbesar Raden Wijaya adalah membangun legitimasi. Sebagai menantu, ia mengambil kebijakan pernikahan politik yang strategis. Menurut Hasan Djafar (2011: 48), pernikahan Wijaya dengan empat putri Kertanegara berfungsi untuk menyatukan seluruh fraksi pendukung Singasari di bawah satu payung kekuasaan baru. Hal ini diperkuat oleh narasi dalam Nagarakretagama Pupuh 47 yang menekankan bahwa Raden Wijaya bukan sekadar pendiri kerajaan baru, melainkan pemulih tatanan dunia (Muljana, 2006: 142). Majapahit diposisikan sebagai "Singasari Baru" yang telah belajar dari kesalahan masa lalu melalui penguatan birokrasi (Muallifah, 2018).

Rekonstruksi legitimasi melalui penyatuan mandala merupakan langkah krusial Raden Wijaya untuk mengakhiri fragmentasi politik pasca-runtuhnya Singasari. Dalam tradisi politik Jawa Kuno, "Mandala" bukan sekadar wilayah geografis, melainkan lingkaran pengaruh kekuasaan yang berpusat pada raja sebagai poros dunia (*cakrawartin*). Menurut Santoso (2023), Raden Wijaya memahami bahwa pendirian Majapahit harus dipandang sebagai pemulihan (*restoration*) dari tatanan Wangsa Rajasa yang sempat terputus oleh kudeta Jayakatwang. Penyatuan kembali mandala ini dilakukan dengan mengintegrasikan sisa-sisa kekuatan Singasari ke dalam struktur baru yang lebih stabil, guna menciptakan kesan kontinuitas sejarah yang tidak terputus.

Strategi utama dalam penyatuan mandala ini adalah melalui mekanisme "Pernikahan Suci" yang bersifat politis-religius. Hasil studi literatur oleh Achmad (2021) menegaskan bahwa dengan menikahi empat putri Kertanegara, Raden Wijaya tidak hanya mengamankan hak waris biologis, tetapi juga menyatukan berbagai faksi pendukung setia Singasari yang tersebar. Keempat putri tersebut melambangkan arah mata angin mandala yang kini berpusat kembali pada Raden Wijaya. Langkah ini secara efektif mengeliminasi potensi munculnya raja-raja kecil di daerah yang mungkin mencoba mengklaim kemerdekaan pasca-runtuhnya pusat kekuasaan di Tumapel.

Secara ideologis, rekonstruksi legitimasi ini diperkuat melalui narasi silsilah dalam naskah-naskah historiografi yang menghubungkan Majapahit langsung dengan Ken Arok. Mualifah (2018) berargumen bahwa konstruksi identitas "Wangsa Rajasa" dalam naskah seperti *Nagarakretagama* berfungsi sebagai alat pemersatu psikologis bagi rakyat. Dengan menegaskan bahwa Raden Wijaya adalah keturunan sah yang membawa "darah pemersatu" Ken Arok, Majapahit berhasil meredam resistensi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya loyal kepada Singasari. Legitimasi ini memberikan dasar moral bahwa ketaatan kepada Majapahit adalah ketaatan kepada garis suci yang telah ditakdirkan untuk menguasai Jawa.

Penyatuan mandala juga dilakukan melalui penguatan jaringan birokrasi yang bersifat meritokrasi namun tetap terikat pada loyalitas pribadi. Berdasarkan penelitian Pratama (2020), pengangkatan para pengikut setia dari masa pelarian di Hutan Tarik ke dalam jabatan-jabatan strategis seperti *Rakryan Mahapatih* merupakan taktik untuk menjaga inti mandala tetap solid. Raden Wijaya memberikan otonomi terbatas pada penguasa daerah melalui pemberian tanah perdikan (*sima*), namun tetap di bawah pengawasan pusat. Pola hubungan patronase ini memastikan bahwa setiap "mandala kecil" di daerah selalu berputar mengelilingi "mandala besar" di pusat Majapahit.

Rekonstruksi ini juga menyentuh aspek rekonsiliasi dengan sisa-sisa kekuatan Kediri guna menciptakan stabilitas jangka panjang. Nugroho (2022) mencatat bahwa meskipun Jayakatwang telah dikalahkan, Raden Wijaya tetap memperlakukan wilayah bekas Kediri sebagai bagian integral dari mandala Wangsa Rajasa dengan menempatkan pejabat-pejabat yang mampu menjembatani kepentingan lama dan baru. Strategi ini menunjukkan pergeseran dari gaya kepemimpinan Kertanegara yang konfrontatif menuju gaya Wijaya yang lebih akomodatif. Penyatuan ini penting untuk mencegah munculnya kembali sentimen balas dendam yang secara historis selalu meruntuhkan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Dari perspektif simbolisme agama, penyatuan mandala Wangsa Rajasa dilakukan melalui sinkretisme kepercayaan yang menyatukan pemujaan terhadap leluhur. Menurut Santoso (2023), Raden Wijaya membangun candi-candi pendharmaan yang mengagungkan raja-raja pendahulunya dari Singasari. Tindakan ini merupakan pesan visual kepada publik bahwa spirit Singasari kini bersemayam dan melindungi Majapahit. Penyatuan secara spiritual ini sangat efektif dalam masyarakat Jawa Kuno yang percaya bahwa restu dari arwah leluhur (*ancestor worship*) adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan sebuah dinasti.

Selain itu, keberhasilan pengusiran tentara Mongol digunakan sebagai alat legitimasi kedaulatan mandala atas pengaruh asing. Nugroho (2022) menekankan bahwa kemenangan atas Mongolia memberikan bukti nyata bahwa mandala Wangsa Rajasa di bawah Raden Wijaya memiliki perlindungan kosmis yang kuat. Hal ini menarik simpati dari kerajaan-kerajaan di luar Jawa (nusantara) untuk kembali menyatakan tunduk atau menjalin aliansi dengan Majapahit. Penyatuan mandala dalam skala yang lebih luas (Nusantara) pun mulai dirintis, bukan lagi melalui penaklukan paksa seperti era Singasari, melainkan melalui kewibawaan yang lahir dari kemenangan militer yang heroik.

Sebagai sintesis akhir, rekonstruksi legitimasi penyatuan mandala Wangsa Rajasa oleh Raden Wijaya adalah sebuah strategi multidimensi yang menggabungkan kekuatan darah, diplomasi pernikahan, narasi sejarah, dan supremasi militer. Rohmansyah (2022) menyimpulkan bahwa Majapahit berhasil berdiri kokoh karena Raden Wijaya mampu menjahit kembali robekan-robekan politik yang ditinggalkan oleh keruntuhan Singasari. Penyatuan ini menciptakan stabilitas internal yang menjadi modal utama bagi Majapahit untuk berkembang menjadi imperium terbesar di Nusantara, membuktikan bahwa legitimasi yang kuat adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan sebuah wangsa di tengah gempuran krisis global dan domestik.

Transformasi Geopolitik dan Ekonomi

Secara geopolitik, Majapahit melanjutkan ambisi Cakrawala Mandala Nusantara namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Paul Michel Munoz (2006) mencatat bahwa Majapahit berhasil menguasai titik-titik krusial perdagangan rempah-rempah. Majapahit bertransformasi menjadi kekuatan maritim *thalasso-kratik* yang mampu mengontrol arus barang dari Maluku hingga Malaka (Hall, 2011), mempertegas bahwa Majapahit adalah penyempurnaan visi Singasari yang gagal secara manajerial namun kuat secara konseptual.

Transformasi geopolitik dari era Singasari menuju Majapahit menandai pergeseran fundamental dalam strategi penguasaan ruang di Nusantara. Pada masa Singasari, doktrin *Cakrawala Mandala Nusantara* Kertanegara lebih bersifat ekspansi teritorial-militeristik untuk membendung pengaruh Mongol. Namun, Majapahit di bawah Raden Wijaya melakukan reorientasi dengan mengintegrasikan kekuatan daratan dan maritim secara lebih seimbang. Menurut Nugroho (2022), transformasi ini krusial karena Majapahit menyadari bahwa kedaulatan politik hanya dapat bertahan jika didukung oleh kontrol atas jalur logistik strategis. Geopolitik Majapahit bergeser dari sekadar "penyatuan wilayah" menjadi "pengamanan jalur ekonomi," yang menjadikan Jawa sebagai poros utama perdagangan di Asia Tenggara.

Secara ekonomi, transisi ini memicu perubahan struktur dari sistem agraris tertutup menjadi ekonomi maritim yang terbuka dan terintegrasi secara global. Hasil studi literatur oleh Hall (2011) dalam interpretasi baru Nugroho (2022) menunjukkan bahwa Majapahit mulai mengomersialkan sektor pertanian melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa (Hujung Galuh dan Tuban). Surplus beras dari pedalaman Jawa tidak lagi hanya digunakan untuk konsumsi lokal atau upeti, tetapi menjadi komoditas barter utama untuk mendapatkan rempah-rempah dari Maluku dan keramik dari Tiongkok. Transformasi ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi di mana kekuatan darat Majapahit mampu menyokong ambisi maritimnya.

Interaksi dengan pasukan Mongol memberikan pelajaran penting bagi Raden Wijaya mengenai pentingnya logistik militer dan ekonomi yang terpadu. Achmad (2021) mencatat bahwa pembangunan pusat kekuasaan di Hutan Tarik (Majapahit) dipilih karena kedekatannya dengan akses sungai Brantas. Sungai ini berfungsi sebagai jalan tol ekonomi yang menghubungkan pedalaman penghasil padi dengan pelabuhan internasional. Transformasi geopolitik ini menempatkan Majapahit pada posisi strategis untuk mengontrol arus keluar-masuk barang, yang secara otomatis memberikan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) yang tinggi terhadap pedagang-pedagang asing dari India, Arab, dan Tiongkok.

Dinamika ekonomi Majapahit juga ditandai dengan perubahan sistem moneter yang lebih masif dibandingkan era Singasari. Berdasarkan penelitian Pratama (2020), meluasnya penggunaan mata uang logam (koin picis atau kepeng) dari Tiongkok mencerminkan tingginya intensitas perdagangan internasional. Transformasi ini memudahkan transaksi di pasar-pasar lokal dan pelabuhan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara melalui sistem pajak dan cukai pelabuhan. Pengelolaan ekonomi yang lebih sistematis ini menjadi bahan bakar utama bagi Majapahit untuk membiayai angkatan perang yang kuat guna menjaga stabilitas geopolitik di wilayah-wilayah bawahan (*mancanegara*).

Dari sisi geopolitik regional, keberhasilan Majapahit mengusir kekuatan global Mongol mengubah persepsi kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka. Menurut Mualifah (201), Majapahit mewarisi visi pengaruh Singasari di Sumatera (eks-Ekspedisi Pamalayu) namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Majapahit memposisikan diri sebagai pelindung rute perdagangan bebas dari gangguan bajak laut dan monopoli asing. Transformasi dari pola "penaklukan" ke pola "protektorat" ini membuat banyak penguasa lokal di Nusantara lebih memilih beraliansi dengan Majapahit demi keamanan ekonomi bersama, yang memperkuat dominasi geopolitik Majapahit tanpa harus terus-menerus melakukan mobilisasi militer besar-besaran.

Pengaruh geopolitik Majapahit juga didorong oleh penguasaan teknologi perkapalan yang meningkat pasca-konflik dengan Mongol. Nugroho (2022) menekankan bahwa adaptasi terhadap teknik pembuatan kapal besar (Jung Jawa) memungkinkan Majapahit melakukan proyeksi kekuatan hingga ke semenanjung Malaya dan Filipina Selatan. Ekonomi maritim ini didukung oleh komoditas unggulan berupa kayu jati dan hasil bumi lainnya yang menjadi kebutuhan utama pembuatan kapal di Asia Tenggara. Kemampuan manufaktur dan kendali sumber daya alam ini menempatkan Majapahit sebagai "pabrik" sekaligus "polisi" laut di kawasan Nusantara.

Selain itu, transformasi ini menciptakan tatanan sosial-politik baru di mana elit-elit lokal mulai terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan internasional yang dipusatkan di ibu kota Majapahit. Santoso (2023) menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Raden Wijaya yang memberikan hak perdikan (*simu*) kepada para pendukungnya di jalur-jalur strategis bertujuan untuk menciptakan benteng-benteng

ekonomi di sepanjang sungai dan pesisir. Penataan ruang geopolitik ini memastikan bahwa setiap ancaman yang masuk melalui jalur ekonomi dapat dideteksi dan diredam lebih dini sebelum mencapai pusat kekuasaan di Trowulan.

Sebagai sintesis, transformasi geopolitik dan ekonomi pasca-Singasari merupakan fondasi yang memungkinkan Majapahit bertahan selama dua abad. Rohmansyah (2022) menyimpulkan bahwa kegagalan Singasari adalah kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara ambisi luar negeri dan ketahanan ekonomi domestik. Majapahit berhasil memperbaiki kesalahan tersebut dengan menjadikan ekonomi sebagai tulang punggung geopolitiknya. Keberhasilan Raden Wijaya membangun sistem yang menyatukan surplus agraris pedalaman dengan perdagangan maritim internasional adalah kunci utama yang membawa Majapahit menjadi kekaisaran *thalasso-keratik* terbesar, yang kekuatannya tidak hanya berdasar pada pedang, tetapi juga pada kendali arus kemakmuran Nusantara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika politik dan transformasi kekuasaan pada akhir abad ke-13, dapat disimpulkan bahwa runtuhnya Kerajaan Singasari merupakan hasil dari akumulasi kegagalan manajemen risiko terhadap ancaman multidimensi. Kebijakan ekspansi Kertanegara melalui Ekspedisi Pamalayu menciptakan kevakuman militer domestik (*strategic overstretch*) yang dieksploitasi secara fatal oleh fragmentasi politik internal di bawah Jayakatwang. Namun, kehancuran ini menjadi katalisator bagi Raden Wijaya untuk melakukan rekonstruksi tatanan politik yang lebih adaptif melalui pendirian Kerajaan Majapahit.

Kesuksesan transformasi ini terletak pada kemampuan Raden Wijaya dalam mengintegrasikan tiga strategi utama: diplomasi pragmatis terhadap intervensi global Mongol, penguatan legitimasi melalui penyatuan mandala Wangsa Rajasa (pernikahan politik), serta reorientasi geopolitik-ekonomi dari agraris murni menuju kekuatan maritim. Majapahit lahir bukan sekadar sebagai entitas baru, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan visi Cakrawala Mandala Nusantara yang didukung oleh struktur birokrasi dan ketahanan ekonomi yang lebih solid. Akhirnya, transisi ini membuktikan bahwa keberlangsungan sebuah imperium sangat bergantung pada keseimbangan antara ambisi pengaruh luar negeri dengan stabilitas politik dalam negeri, sebuah pelajaran historis yang menjadikan Majapahit sebagai imperium *thalasso-keratik* terbesar yang pernah menyatukan Nusantara.

Referensi

- Achmad, S. W. (2021). *Pemberontakan Jayakatwang dan Terbentuknya Kerajaan Majapahit*. Jakarta: Araska.
- Djafar, H. (2011). *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*. Jakarta: Komunitas Bambu. (Edisi pembaruan).
- Garraghan, G. J. (1946). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Groeneveldt, W. P. (2009). *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu. (Interpretasi kontemporer).
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mualifah. (2018). "Peranan Banyak Wide dalam Kehidupan Politik Kerajaan Singasari, Kediri, dan Majapahit 1269-1296 M". *Jurnal Ilmu Sejarah UNY*, Vol. 13 (4).
- Muljana, S. (2005). *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKiS.
- Muljana, S. (2006). *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. Jakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Munoz, P. M. (2006). *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago*. Singapore: Didier Millet.
- Nugroho, I. D. (2022). *Diplomasi dan Peperangan Jawa-Mongol: Analisis Kronik Yuan-shi dalam Perspektif Pertahanan*. Surabaya: Pustaka Sejarah.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, A. Y. (2020). "Strategi Militer Jayakatwang dalam Penggulingan Kekuasaan Kertanegara di Singasari". *Jurnal Historiografi*, Vol. 1 (2).
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rohmansyah, A. (2022). "Analisis Spasial dan Pertahanan Awal Kerajaan Majapahit di Hutan Tarik". *Jurnal Arkeologi Nasional*.
- Santoso, P. (2023). "Konflik Internal dan Runtuhnya Legitimasi Wangsa Rajasa: Sebuah Kajian Sosiopolitik". *Jurnal Sosial-Humaniora*.

- Slametmuljana. (1979). *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Yule, H. (2016). *Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China*. (Interpretasi baru dalam studi perdagangan maritim).
- Zoetmulder, P. J. (1983). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.